



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI PATAPPOI**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **772430**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.950.000.000**

1. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN
Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 585 m2/165 m2 di KAB / KOTA
JENEPONTO, WARISAN Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp.
300.000.000
4. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN
Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN
Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 106.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RAUM GT (BUILD UP) Tahun 2003, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, ZUZUKI GSX 500 CC Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 33.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 6.000.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 3.095.500.000**



III. HUTANG

Rp.

80.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.015.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.